

**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
I.1    Latar Belakang.....	1
I.2    Landasan Hukum .....	2
I.3    Maksud dan Tujuan.....	3
I.4    Sistematika Penulisan .....	4
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
II.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
II.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
II.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	13
2.3.1    Analisis Tingkat Kinerja.....	13
2.3.2    Permasalahan .....	13
2.3.3    Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi.....	14
II.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
II.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	26
III.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
III.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	28
III.3    Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V    PENUTUP.....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Satpol PP Kota Pekalongan .....	7
Tabel T-C.30	Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP .....	12
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....	15
Tabel T-C.32	Usulan prgoram dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022 .....	25
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Satpol PP Kota Pekalongan .....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2022 disusun dengan mengacu

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis Satpol PP Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Satpol PP Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Satpol PP Kota Pekalongan tahun 2022 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2022. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Satpol PP Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Satpol PP Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

**BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2021. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2021) Satpol PP dapat disajikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Satpol PP Kota Pekalongan

No.	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian Renstra sd 2020	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas</b>										
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	Persen	100	-	44,44	29	18,52	18,52	18,52	Belum Tercapai
	- Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Pelatihan SDM, dan Pelatihan Penanggulangan Huru Hara yang dilaksanakan	Kegiatan			13	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan sarasehan tibum tranmas, PAM Insidenatl dan Operasi KST yang dilaksanakan	kegiatan			90	145	184	184	126	Tercapai
	- Jumlah kegiatan Bintek Tibum Tranmas, Bintek Perundang-undangan dan Kesempataan evaluasi banpol yang dilaksanakan	Kegiatan			9	3	3	3	100	Tercapai
3	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	kali			48	48	48	48	100	Tercapai
4	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah hari PAM Obvrit yang dilaksanakan	hari			180	180	180	180	100	Tercapai
	- Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	hari			90	60	60	60	100	Tercapai
	- Jumlah hari pelaksanaan kegiatan Patroli dan PAM Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Corona	hari			0	60	60	60	100	Tercapai

No.	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian Renstra sd 2020	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2020	Realisasi Tahun 2020			
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilu	kali			6	1	1	1	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan	kali			47	40	40	40	100	Tercapai
	- Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi tawon dan binatang berbahaya yang ditangani	Kejadian			132	25	179	179	716	Tercapai
	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali			0	3	3	3	100	Tercapai
	- Jumlah latihan damkar yang dilaksanakan	kali			0	3	3	3	100	Tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat damkar	orang			0	2	0	0	0	Belum Tercapai
	- Jumlah lemari yang diadakan	unit			0	1	1	1	100	Tercapai
	- Jumlah baju tahan panas yang diadakan	buah			0	8	8	8	100	Tercapai
	- Jumlah tenda pemadam kebakaran yang diadakan	buah			0	2	4	4	100	Tercapai
	- Jumlah LCD proyektor yang diadakan	unit			0	1	1	1	100	Tercapai
	- Jumlah handy talky yang diadakan	unit			0	4	4	4	100	Tercapai
	- Jumlah pemeliharaan mobil berat yang dilaksanakan	unit			0	1	1	1	100	Tercapai
6	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Persen	100	-	99,35	100	98,71	98,71	98,71	Akan Tercapai
	- Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan	kali			252	192	192	192	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan intelegen yang dilaksanakan	kali			0	72	72	72	100	Tercapai
	- Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan	kali			0	5	5	5	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	kali			0	4	4	4	100	Tercapai

No.	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian Renstra sd 2020	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2020	Realisasi Tahun 2020			
<b>Urusan Rutin</b>										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah penyediaan sarana dan prasarana covid-19	Jenis			0	8	8	8	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang /kali			192	50	85	85	170	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (2018)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian Renstra sd 2020	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2020	Realisasi Tahun 2020			
	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit			2	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit			24	28	37	37	132	Tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit			44	3	6	6	150	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	100	0	90	90	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Stel			2384	173	173	173	100	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	dokumen			6	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen			6	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen			0	5	5	5	100	Tercapai
6	Pengaduan yang diterima	kasus	0	-	-	0	0	0	100	Tercapai
	- Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	orang/bulan			2	2	2	2	100	Tercapai

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satpol PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis Satpol PP Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel. T.C-30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP  
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM			-	50	60	70	-	50	60	70	
2	Persentase penanganan bencana kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			-	60	62	64	-	60	62	64	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum			-	80	85	90	-	80	85	90	
6	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			-	20	20	20	-	20	20	20	
7	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			8	8	11	13	8	8	8	13	
8	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya			-	100	100	100	-	100	100	100	
10	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran			-	100	100	100	-	100	100	100	
11	Persentase penanganan kondisi membahayakan			-	100	100	100	-	100	100	100	

## **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja**

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, SATPOL PP Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut, SATPOL PP Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat” dengan Tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”.

Dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis TI”, sasaran “Meningkatnya Penegakan Perda”, dengan Indikator Kinerja “Persentase Penegakan Perda”. Capaian Indikator Kinerja tersebut pada tahun 2018 sebesar 94%.

### **2.3.2 Permasalahan**

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai).

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi**

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini SATPOL PP Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik SATPOL PP Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja SATPOL PP Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”.

## **II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD Tahun 2022 merupakan awal dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun berikutnya yang bersifat skala prioritas. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Adapun dalam penyusunan Renja tahun 2022 hal-hal yang diperhatikan sebagai bahan pertimbangan adalah identifikasi Program/kegiatan/sub kegiatan Review terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen  100 persen  100 persen	<b>5.975.698.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen  100 persen  100 persen	<b>5.975.698.000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen renja yang disusun 2. Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	2 dokumen  1 dokumen	10.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen renja yang disusun 2. Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	3 dokumen  1 dokumen	10.750.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.650.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun 2. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	4 dokumen 2 dokumen 12 bulan 5 dokumen	<b>50.050.000</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun 2. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	4 dokumen 2 dokumen 12 bulan 5 dokumen	<b>50.050.000</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.837.207.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.837.207.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.783.957.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.783.957.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	51.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	51.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>9.500.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>9.500.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>320.138.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>320.138.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan 26 unit	130.638.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan 26 unit	130.638.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	97.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	97.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	124 kali	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	124 kali	65.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>140.500.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>140.500.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	138.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	138.500.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>605.903.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>605.903.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28 unit	325.403.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28 unit	325.403.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	260.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	260.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>62 persen</b>	<b>6.280.567.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>62 persen</b>	<b>6.280.567.000</b>	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>85 persen</b>	<b>2.135.841.000</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>85 persen</b>	<b>2.135.841.000</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	48 kali	106.600.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	48 kali	106.600.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	1. Jumlah kegiatan sarasehan kantrantibmas yang dilaksanakan 2. Jumlah operasi Kader Siaga Trantib (KST) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM insidental yang dilaksanakan	2 kali 10 kali 96 kali	337.885.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	1. Jumlah kegiatan sarasehan kantrantibmas yang dilaksanakan 2. Jumlah operasi Kader Siaga Trantib (KST) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM insidental yang dilaksanakan	2 kali 10 kali 96 kali	337.885.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 2. Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	365 hari 120 hari 4 kegiatan	1.430.356.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 2. Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal	365 hari 120 hari 4 kegiatan	1.430.356.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan 4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan 6. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	25 kali    220 kali  48 kali				dan Tahun Baru yang dilaksanakan 4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan 6. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	25 kali   220 kali  48 kali		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	35 orang	20.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	35 orang	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	5 kali	48.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	5 kali	48.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	4 kali	148.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	4 kali	148.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketentraman dan Ketertiban Umum					Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana minimal	5 jenis	25.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana minimal	5 jenis	25.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 dokumen	15.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan akibat dari pelaksanaan penegakan perda dan perkada	1 orang	5.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan akibat dari pelaksanaan penegakan perda dan perkada	1 orang	5.000.000	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.479.144.000</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.479.144.000</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	27 kelurahan	229.500.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	27 kelurahan	229.500.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	12 kali	35.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	12 kali	35.000.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah operasi penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	24 kali	3.858.726.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah operasi penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan 2. Jumlah anggota Satpol PP	24 kali 25 orang	3.858.726.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksa 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan SIM Penegakan Perda	25 orang  5 kali				yang mengikuti diksa 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan SIM Penegakan Perda	5 kali		
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>11 persen</b>	<b>21.500.000</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>11 persen</b>	<b>21.500.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	21.500.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	21.500.000	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>868.000.000</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>868.000.000</b>	
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	738.000.000	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	738.000.000	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan latihan pemadaman kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Inspeksi	31 kali	53.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan latihan pemadaman kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Inspeksi Alat Proteksi	31 kali	53.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Alat Proteksi kebakaran yang dilaksanakan					kebakaran yang dilaksanakan			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	180 aduan	600.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	180 aduan	600.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3 unit	15.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 kali	20.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 kali	20.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah HT yang diadakan	3 buah	10.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah HT yang diadakan	3 buah	10.000.000	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	3 dokumen	40.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	3 dokumen	40.000.000	
	<b>Inspeksi Peralatan</b>	<b>Kota</b>	Persentase sarana dan	100 persen	50.000.000	<b>Inspeksi Peralatan</b>	<b>Kota</b>	Persentase sarana dan prasarana	100 persen	50.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Proteksi Kebakaran</b>	<b>Pekalongan</b>	prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya			<b>Proteksi Kebakaran</b>	<b>Pekalongan</b>	proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya			
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	48 dokumen	50.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	48 dokumen	50.000.000	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	50.000.000	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	50.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan seksi pemadam kebakaran	5 orang	50.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan seksi pemadam kebakaran	5 orang	50.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	30.000.000	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	30.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah laporan kondisi membahayakan yang ditangani	120 kali	30.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah laporan kondisi membahayakan yang ditangani	120 kali	30.000.000	

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32 sebagaimana terlampir.

Tabel T.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Satpol PP Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Satpol PP menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
  - Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran
2. Tujuan 2 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum
  - Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Satpol PP Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2022 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai Sakip Satpol PP	
		b. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	b. Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		1. Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	475 aduan
		a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	60%

### III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2022 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2021. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 13.124.265.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Satpol PP Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>13.124.265.000</b>				<b>13.124.265.000</b>
<b>01.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>13.124.265.000</b>				<b>13.124.265.000</b>
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</li> <li>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</li> </ol>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.975.698.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.975.698.000</b>
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen renja yang disusun</li> <li>Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun</li> </ol>	Kota Pekalongan	4 dokumen 1 dokumen	10.750.000	<b>DAU</b>		5 dokumen 1 dokumen	10.750.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.650.000	<b>DAU</b>		2 dokumen	1.650.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun</li> <li>Jumlah dokumen SAKIP yang disusun</li> </ol>	Kota Pekalongan	4 dokumen	<b>50.050.000</b>	<b>DAU</b>		4 dokumen	<b>50.050.000</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		2 dokumen  12 bulan  5 dokumen				2 dokumen  12 bulan  5 dokumen	
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.837.207.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>4.837.207.000</b>
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	12 bulan	4.783.957.000	DAU		12 bulan	4.783.957.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan	12 bulan	51.600.000	DAU		12 bulan	51.600.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.650.000	DAU		1 dokumen	1.650.000
<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>9.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>9.500.000</b>
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	Kota Pekalongan	2 kali	9.500.000	DAU		2 kali	9.500.000
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>320.138.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>320.138.000</b>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU		12 bulan	7.500.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung	Kota Pekalongan	12 bulan  26 unit	130.638.000	DAU		12 bulan	130.638.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kantor yang diadakan						26 unit	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	10.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	12 bulan	97.000.000	DAU		12 bulan	97.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU		12 bulan	7.500.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	DAU		12 bulan	2.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	124 kali	65.000.000	DAU		124 kali	65.000.000
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>140.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>140.500.000</b>
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 bulan	2.000.000	DAU		12 bulan	2.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 bulan	138.500.000	DAU		12 bulan	138.500.000
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>605.903.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>605.903.000</b>
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	28 unit	325.403.000	DAU		28 unit	325.403.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	2 unit	260.500.000	DAU		2 unit	260.500.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	20.000.000	DAU		12 bulan	20.000.000
<b>01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>62 persen</b>	<b>6.280.567.000</b>	<b>DAU</b>		<b>62 persen</b>	<b>6.280.567.000</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>85 persen</b>	<b>2.135.841.000</b>	<b>DAU</b>		<b>85 persen</b>	<b>2.135.841.000</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Kota Pekalongan	48 kali	106.600.000	DAU		48 kali	106.600.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan sarasehan kantrantibmas yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah operasi Kader Siaga Trantib (KST) yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan PAM insidental yang dilaksanakan</li> </ol>	Kota Pekalongan	2 kali 10 kali 96 kali	337.885.000	DAU		2 kali 10 kali 96 kali	337.885.000
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan</li> </ol>	Kota Pekalongan	365 hari 120 hari 4 kegiatan	1.430.356.000	DAU		365 hari 120 hari 4 kegiatan	1.430.356.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan 6. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan		25 kali  220 kali  48 kali				25 kali  220 kali  48 kali	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Kota Pekalongan	35 orang	20.000.000	DAU		35 orang	20.000.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	5 kali	48.000.000	DAU		5 kali	48.000.000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	4 kali	148.000.000	DAU		4 kali	148.000.000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana minimal	Kota Pekalongan	5 jenis	25.000.000	DAU		5 jenis	25.000.000
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Kota Pekalongan	6 dokumen	15.000.000	DAU		6 dokumen	15.000.000
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah orang yang mendapat pelayanan akibat dari pelaksanaan penegakan perda dan perkada	Kota Pekalongan	1 orang	5.000.000	DAU		1 orang	5.000.000
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.479.144.000</b>	<b>DAU</b>		<b>20 Perda</b>	<b>4.479.144.000</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	Kota Pekalongan	27 kelurahan	229.500.000	DAU		27 kelurahan	229.500.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	12 kali	35.000.000	DAU		12 kali	35.000.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Jumlah operasi penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan 2. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksa 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan SIM Penegakan Perda	Kota Pekalongan	24 kali 25 orang 5 kali	3.858.726.000	DAU		24 kali 25 orang 5 kali	3.858.726.000
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>11 persen</b>	<b>21.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>11 persen</b>	<b>21.500.000</b>
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Kota Pekalongan	3 orang	21.500.000	DAU		3 orang	21.500.000
<b>01.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>868.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>868.000.000</b>
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>738.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>738.000.000</b>
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan latihan pemadaman kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Inspeksi Alat Proteksi kebakaran yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	31 kali	53.000.000	DAU		31 kali	53.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	Kota Pekalongan	180 aduan	600.000.000	DAU		180 aduan	600.000.000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Kota Pekalongan	3 unit	15.000.000	DAU		3 unit	15.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kota Pekalongan	2 kali	20.000.000	DAU		2 kali	20.000.000
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah HT yang diadakan	Kota Pekalongan	3 buah	10.000.000	DAU		3 buah	10.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	Kota Pekalongan	3 dokumen	40.000.000	DAU		3 dokumen	40.000.000
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	<b>Kota Pekalongan</b>	100 persen	50.000.000	<b>DAU</b>		100 persen	50.000.000
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	Kota Pekalongan	48 dokumen	50.000.000	DAU		48 dokumen	50.000.000
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	<b>Kota Pekalongan</b>	100 persen	50.000.000	<b>DAU</b>		100 persen	50.000.000
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan seksi pemadam kebakaran	Kota Pekalongan	5 orang	50.000.000	DAU		5 orang	50.000.000
<b>1.05.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	Persentase penanganan kondisi membahayakan	<b>Kota Pekalongan</b>	100 persen	30.000.000	<b>DAU</b>		100 persen	30.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan kondisi membahayakan yang ditangani	Kota Pekalongan	120 kali	30.000.000	DAU		120 kali	30.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Satpol PP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2022 terdapat 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Setiap sub kegiatan juga telah dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Satpol PP Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satpol PP Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 09 September 2021  
Kepala Pelaksana,  
Satpol PP Kota Pekalongan



Dr. SRIBUDI SANTOSO, M.Si  
NIP. 19701214 199003 1 004